

## DAFTAR PUSTAKA

- Admosudirjo, S. P., 1995, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan 10, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Alexandra, I., 2008, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Cetakan I, Yogyakarta Pustaka.
- Amir, A., *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*, Cet. I, Jakarta Widya Medika.
- Ameln, F., 1991, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, cetakan I, Jakarta, Grafikatama.
- Depkes RI, 1992, *Pedoman Kerja Puskesmas*, Jilid IV, Jakarta, Departemen Kesehatan.
- Djaelani, A., 2008, *Pelimpahan Kewenangan dalam Praktik Kedokteran Kepada Perawat Bidan secara Tertulis Dapat Mengeliminasi Tanggung Jawab Pidana dan Perdata*, Journal Vol.1 No 1, Jakarta, Biro Hukum dan Organisasi Depkes RI.
- Garner, B.A, *Black's law dictionary*, edisi 7, texas.
- Guwandi, J., 1991, *Etika dan Hukum Kedokteran*, Jakarta, FK UI.
- Guwandi, J., 2008, *Hukum dan Dokter*, Cetakan I, Jakarta, Sagung Seto.
- Hadjon, P. M et al, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, judul asli "Introduction to the Indonesian Administrative Law", Cet.IX, Yogyakarta, UGM Press.
- Isfandyarie, A., 2006, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter Buku I*, Jakarta, Prestasi Pustaka.
- Isfandyarie, A., 2006, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter Buku II*, Jakarta, Prestasi Pustaka.
- Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, Cetakan ke-8.
- Konsil Kedokteran Indonesia, 2006, *Standar Kompetensi Dokter Gigi*, Jakarta.

Konsil Kedokteran Indonesia, 2006, *Pedoman Penegakan Disiplin Profesi Kedokteran*, Jakarta.

La OdeJumadi G, 1999, *Pengantar Keperawatan Profesional*, Cetakan I, Jakarta, EGC.

Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.

Lutfi Effendi, 2004, *Pokok-pokok Hukum Administrasi*, Cetakan III, Malang, Bayumedia.

Mariyati, N., 1988, *Mapraktik Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana Dan Perdata*, Cetakan I, Jakarta, Bina aksara.

Ridwan, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Press.

Ridwan, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan II, Yogyakarta, Ull press.

Ronosulistyo, H., Dkk, 2005, *Malpraktik Tinjauan Secara Islami*, Cetaka I, Bandung, Granada.

Sri Praptianingsih, 2006, *Kedudukan Hukum Perawat Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*, Edisi I, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Soewono, H., 2007, *Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Dokter Dalam Transaksi Terapeutik*, Cetakan I, Surabaya, Srikandi.

Sudikno M, 1986, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty.

Sugandhi, 1991, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya, Usaha Nasional.

Suwarsono, 2008, *Kajian Kurikulum Perawat gigi*, Semarang, Politeknik Kesehatan Depkes Semarang.

Wila Chandrawila Supriadi, 2001, *Hukum Kedokteran*, Bandung, Mandar Maju.

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1996 Tentang Tenaga kesehatan.

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1995 Tentang Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/ Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1035/Menkes/SK/IX/1998 Tentang Perawat Gigi.

Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 94/KEP/M.PAN/III/ tahun 2001 Tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya.

Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1392/Menkes/SK/VII/2001 Tentang Registrasi dan Izin Kerja Tenaga Perawat Gigi.

Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat.

Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 284/Menkes/SK/IV/2006 Tentang Standar Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut.

Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 378 tahun 2007 Tentang Standar Profesi Perawat Gigi.

Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 666 Tahun 2007 Tentang Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar.

Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Standar Kompetensi Dokter Gigi.

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Kota Salatiga.

**Lain-Lain**

Badan Perencanaan dan Pembagunan Daerah Kota Salatiga, 2009, Salatiga.

<http://ppgi.wordpress.com/2008/07/18/kajian-kurikulum-jurusan-keperawatan-gigi/>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999, Balai Pustaka, Edisi ke sepuluh, Jakarta, Hlm 862.

Pakpahan, N., 2008, *Standar profesi Perawat Gigi*, <http://www.rohukor.depkes.go.id/?art=26&set=0>.

Profil Kesehatan Kota Salatiga, 2007, Salatiga.

